



## KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN

**KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi

2021



### PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2022/Khusus - Akhir Menjabat)

<b>BIDANG</b>	: EKSEKUTIF		
<b>LEMBAGA</b>	: BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)		
<b>UNIT KERJA</b>	: BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA		
<b>I. DATA PRIBADI</b>			
1. Nama	: PUJO SUMEKTO		
2. Jabatan	: PEJABAT PENGUJ/PENANDATANGAN SPM (PPSPM)		
3. NHK	: 240884		
<b>II. DATA HARTA</b>			
<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>		Rp.	678.800.000
1. Tanah Seluas 774 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI			
	Rp. 154.800.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/140 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI			
	Rp. 524.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>		Rp.	160.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI			
	Rp. 70.000.000		
2. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2007, HASIL SENDIRI			
	Rp. 90.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>		Rp.	11.200.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>		Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>		Rp.	5.062.780
<b>F. HARTA LAINNYA</b>		Rp.	---
<b>Sub Total</b>		Rp.	855.062.780
<b>III. HUTANG</b>		Rp.	---
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>		Rp.	855.062.780

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-